

LAPORAN AKHIR

STUDI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

AKIBAT PANDEMI COVID-19

DI KABUPATEN TANGERANG



KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
(BAPPEDA)
KABUPATEN TANGERANG
DENGAN
IPB UNIVERSITY
2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Kajian	5
1.4. Ruang Lingkup Kajian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.1 Teori Pertumbuhan Robert Solow	7
2.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar.....	8
2.2. Pembangunan Manusia.....	9
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	10
2.2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.....	11
2.2.3 Komponen-komponen IPM	12
BAB III. METODE KAJIAN	19
3.1 Jenis dan Sumber Data	19
3.2 Pengumpulan Data	19
3.3 Teknik Analisis Data.....	19
3.3.1. Review Data Sekunder (<i>secondary data review</i>)	19
3.3.2 Review Data Primer.....	24
BAB IV. PEMBAHASAN	27
4.1. Kondisi Sosial Masyarakat, yaitu Kondisi Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang.....	27
4.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat, yaitu Kesejahteraan dan Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Tangerang	32
4.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang	36

4.4. Hasil Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang	51
4.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	51
4.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53
4.4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	55
4.4.4 Kemiskinan	56
BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Rekomendasi Kebijakan	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan Kecamatan	27
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Tangerang	28
Tabel 3. Jumlah pekerjaan masyarakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	30
Tabel 4. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	51
Tabel 5. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	52
Tabel 6. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	54
Tabel 7. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	55
Tabel 8. Proyeksi Garis Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025.....	57
Tabel 9. Proyeksi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	58
Tabel 10. Proyeksi Gini Rasio di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	59
Tabel 11. Proyeksi Tingkat Inflasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Temuan Kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang.....	3
Gambar 2. Kurva Lorenz.....	22
Gambar 3. Ketercukupan Kebutuhan Pendidikan Masyarakat Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang.....	29
Gambar 4. Tren Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tangerang.....	31
Gambar 5. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang.....	32
Gambar 6. Dampak Pandemi Covid terhadap Perubahan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tangerang.....	33
Gambar 7. Dampak Pandemi Covid terhadap Perubahan Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Tangerang.....	34
Gambar 9. Upaya Adaptasi Masyarakat Selama Pandemi Covid di Kabupaten Tangerang	36
Gambar 10. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2020	37
Gambar 11. Laju PDRB Harga Berlaku Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	37
Gambar 12. PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020... ..	38
Gambar 13. Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	38
Gambar 14. PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020.....	39
Gambar 15. PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020.....	39
Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	40
Gambar 17. Laju Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	41
Gambar 18. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	41
Gambar 19. Laju Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	42
Gambar 20. Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	43
Gambar 21. Laju Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020.....	43

Gambar 22. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	44
Gambar 23. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	45
Gambar 24. Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020	45
Gambar 25. Laju Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020.....	46
Gambar 26. Tingkat Inflasi Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020.....	46
Gambar 27. Tingkat Inflasi Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020.....	47
Gambar 28. Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang	48
Gambar 29. Jumlah Responden yang Mendapatkan Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang.....	49
Gambar 30. Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang	50
Gambar 31. Persepsi Masyarakat terhadap Kecukupan Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang.....	50
Gambar 32. Proyeksi Laju PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang	52
Gambar 33. Proyeksi Laju PDRB Atas Harga Konstan di Kabupaten Tangerang.....	53
Gambar 34. Proyeksi Laju Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang	55
Gambar 35. Proyeksi Laju Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang	56
Gambar 36. Proyeksi Laju Garis Kemiskinan di Kabupaten Tangerang	57
Gambar 37. Proyeksi Laju Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tangerang .	59
Gambar 38. Proyeksi Gini Rasio di Kabupaten Tangerang.....	60
Gambar 39. Proyeksi Tingkat Inflasi di Kabupaten Tangerang	61

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

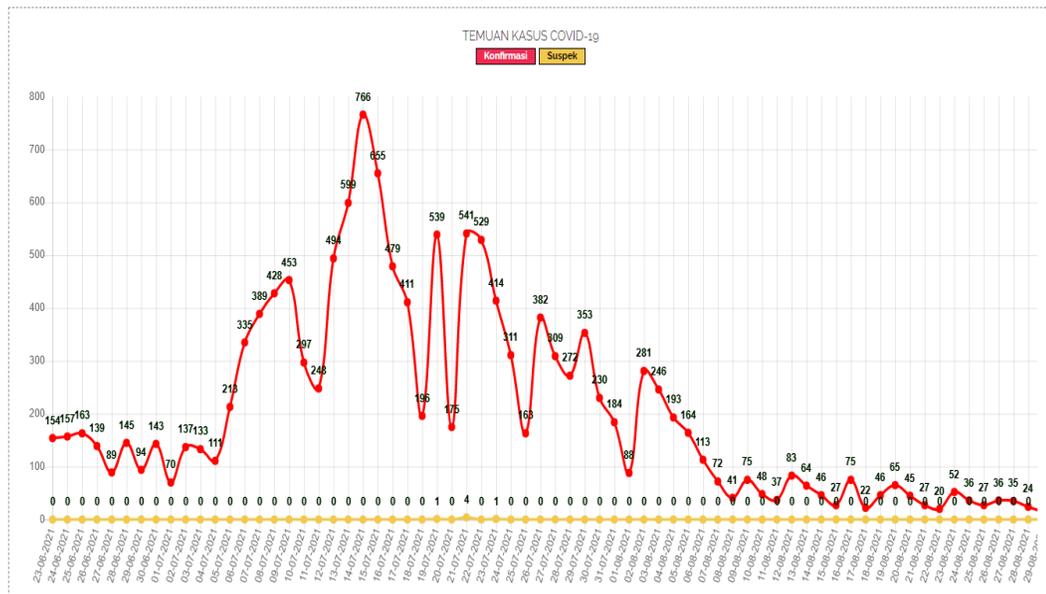
Virus Corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit yang disebabkan virus ini disebut Covid-19. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan baru ditemukan pada tahun 2019 di Kota Wuhan China, serta belum pernah diidentifikasi pada manusia. Tanda-tanda umum yang terinfeksi virus ini yaitu gejala pernafasan, demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (WHO 2020).

Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 3 Maret 2020. Kasus pertama datang dari warga Depok, Jawa Barat. Wilayah Transmisi lokal penularan virus corona di Indonesia mencakup lima provinsi. DKI Jakarta; Banten yang meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang; Jawa Barat yang meliputi Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan Karawang; Jawa Tengah yang meliputi Solo, dan Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Malang, Magetan dan Surabaya, (KEMENKES 2020).

World Health Organization (WHO) telah menetapkan status gawat darurat global untuk wabah Covid-19. Munculnya wabah Covid-19 menjadi perhatian dunia karena banyak aspek yang terpengaruh. Berdasarkan data BPS

(2021) mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi juga terjadi di Kabupaten Tangerang, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar -3,7% di bandingkan tahun 2019. Dampak Covid-19 juga berdampak terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran serta dampak sosial ekonomi lainnya.

Adanya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat, namun juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang didapatkan bahwa kondisi Covid-19 masih berfluktuasi walaupun mengalami trend penurunan saat ini.



Gambar 1. Temuan Kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa pada awal Juli hingga awal Agustus covid-19 di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan atau gelombang 2 pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Penurunan berbagai aktivitas karena adanya kebijakan dalam penurunan kasus Covid-19 memberikan dampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang dengan

menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat miskin, petani, nelayan, serta UMKM.

Untuk mengetahui sejauhmana dampak covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat, maka diperlukan kajian Studi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tangerang. Diharapkan adanya kajian ini dapat membantu penyusunan kebijakan dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari kajian ini, yaitu adanya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Tangerang, yang secara umum tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui sejauhmana dampak covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang. Permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana dampak covid-19 terhadap kondisi sosial yaitu kesehatan, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan.?
2. Bagaimana dampak covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat yaitu penurunan kesejahteraan, peningkatan pengeluaran keluarga?
3. Bagaimana dampak covid-19 terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Tangerang.
4. Mengetahui efektifitas bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi makro Kabupaten Tangerang?
5. Bagaimana strategi kebijakan yang harus dilakukan dalam melakukan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Tangerang?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan diadakannya Studi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tangerang adalah:

1. Mengetahui dampak covid-19 terhadap kondisi sosial yaitu kesehatan, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan.
2. Mengetahui dampak covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat yaitu penurunan kesejahteraan, peningkatan pengeluaran keluarga.
3. Mengetahui dampak covid-19 terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Tangerang.
4. Mengetahui efektifitas bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi makro Kabupaten Tangerang.
5. Mengetahui strategi kebijakan yang harus dilakukan dalam melakukan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Ruang Lingkup penyusunan data dan analisa Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

- a) Menyajikan hasil analisis terhadap kondisi sosial masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
- b) Menyajikan hasil analisis terhadap kondisi ekonomi masyarakat yaitu kesejahteraan dan pengeluaran masyarakat di Kabupaten Tangerang.
- c) Menyajikan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2020 terutama berkaitan dengan capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Tangerang

Tahun 2010-2020 (IPM, TPT, Kemiskinan, Gini Rasio, Inflasi, LPE, dan PDRB per Kapita)

- d) Mengidentifikasi efektifitas bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi makro Kabupaten Tangerang.
- e) Melakukan proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tangerang tahun 2020 – 2024 serta merumuskan rekomendasi strategi dan arah kebijakan terkait percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai dalam perkembangan suatu perekonomian. Adanya perkembangan ini dapat dilihat dari besarnya kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Apabila terjadi peningkatan pada PDB dari tahun sebelumnya, maka dapat diartikan negara tersebut sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.

2.1.1 Teori Pertumbuhan Robert Solow

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi sudah banyak dirancang oleh ahli ekonomi salah satunya adalah Robert Solow yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi). Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung kepada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio*) bisa berubah. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbedabeda pula. Jika lebih banyak modal yang

digunakan, maka tenaga kerja yang digunakan lebih sedikit. Sebaliknya jika kapital yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar menganalisis persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu negara agar perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang secara mantap atau *steady state*. Model pertumbuhan Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman kapitalis maju dan berusaha mempelajari syarat pertumbuhan mantap atau *steady state* suatu negara maju. Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi memberikan peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dianggap sebagai faktor penting karena memiliki dua peran dalam memengaruhi perekonomian. Kedua peran tersebut adalah pertama, investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan yang artinya investasi memengaruhi permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan memengaruhi perubahan kapasitas produksi.

Menurut model pertumbuhan Harrod-Domar, pada dasarnya setiap perekonomian harus menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk berinvestasi pada barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Tetapi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi baru berupa tambahan bersih dari cadangan atau stok modal kapital. Pertambahan ini akan meningkatkan output nasional atau GDP (Todaro dan Smith, 2006).

2.2. Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut dapat dikatakan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma

pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternative pengukuran pembangunan selain menggunakan *Gross Domestic Bruto*. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan factor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah

negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

2.2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Indeks layak hidup diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

2.2.3 Komponen-komponen IPM

1. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program *Mortpak*. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah.

Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan tujuan IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

2.3 Kemiskinan

Tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar atau sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat

pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Begitupun sebaliknya, seberapa apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin meluas.

Para ekonomi pembangunan menggunakan konsep kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun masalah yang timbul adalah sulitnya menentukan tingkat hidup minimum, karena tingkat tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu daerah ke daerah lainnya, yang mencerminkan perbedaan kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial dan ekonomi dari setiap orang.

Oleh karena itu, para ahli ekonomi cenderung membuat perkiraan-perkiraan yang serba konservatif atau sederhana tentang kemiskinan dunia dalam rangka menghindari perkiraan-perkiraan yang berlebihan. Metodologi umum yang digunakan sebagai dasar dari perkiraan tersebut adalah garis kemiskinan internasional yang tidak mengenal tapal batas antarnegara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau US\$2 per hari dalam dolar PPP (Todaro 2006). Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau hitungan per kepala (*Headcount*) untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut.

Kemiskinan menurut penyebabnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan

alamiah timbul karena sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya pembangunan lainnya yang langka jumlahnya, karena perkembangan teknologi rendah, sehingga masyarakat tidak berperan aktif dalam pembangunan. Kemiskinan struktural timbul disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, kepemilikan sumberdaya yang belum merata, kemampuan tidak seimbang, ketidak merataan kesempatan, menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak merata. Kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan data seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin atau tidak mau disebut miskin (Soegijoko *et al.*, 1997). Akar penyebab kemiskinan pedesaan dan perkotaan menurut Papilaya (2013):

1. Tipologi Kemiskinan Pedesaan. Menurut Munker dalam Papilaya (2013) sebab-sebab utama kemiskinan di pedesaan adalah ketidakmampuan masyarakat menghadapi kondisi-kondisi yang berubah, karena (a) kondisi kesehatan dan fisik yang lemah karena kekurangan gizi dan penyakit; (b) pengalaman yang menjadi sumber pengetahuan tidak relevan dengan perubahan zaman; (c) ketiadaan akses terhadap teknologi; (d) sumber pendapatan tidak terjamin; (e) kondisi pemerintahan, hukum, dan politik tidak berpihak pada kaum miskin; dan (f) bias perkotaan dan terbatasnya infrastruktur pedesaan.
2. Tipologi Kemiskinan Perkotaan. Penyebab kemiskinan di perkotaan, yaitu: (a) kerangka kerja pemerintah dan hukum yang tidak memadai; (b)

urbanisasi, buta huruf, kawasan kumuh; (c) ketidakmampuan mendapatkan kerja; (d) pengangguran; dan (e) tidak memiliki akses terhadap sumberdaya tanah air dan negeri.

Papilaya (2013) merumuskan delapan strategi percepatan pengurangan kemiskinan dan pemiskinan sebagai berikut:

1. Pelembagaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Strategi ini bertujuan untuk membentuk atau mengubah perilaku individu dan perilaku kolektif menjadi perilaku baru yang lebih produktif dan normatif bagi rumah tangga miskin, pemerintah/para elitis, dan dunia usaha. Strategi ini dilakukan melalui pelembagaan dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam kehidupan rumah tangga dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik.

2. Peningkatan kapabilitas rumah tangga miskin

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi diri, rasa percaya diri, dan kemampuan serta *spirit* kewirausahaan rumah tangga miskin (RTM) dan *stakeholders* terkait.

3. Revitalisasi modal sosial

Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal sebagai kekuatan perekat, pendorong, dan penghela di antara sesama *stakeholder* pembangunan sehingga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pemiskinan.

4. Advokasi kebijakan publik

Strategi ini bertujuan untuk melakukan reorientasi modal politik melalui reformasi kebijakan (*policy reform*) dan penganggaran publik sehingga

lebih berpihak pada upaya pengurangan kemiskinan dan pemiskinan (*pro-poor budgrting*).

5. Peningkatan keterjaminan sosial

Strategi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan rasa aman bagi rumah tangga miskin, sangat miskin (miskin absolut). Khususnya bagi mereka yang berusia nun produktif atau mereka yang mengalami dampak bencana alam dan konflik sosial.

6. Pemberdayaan infrastruktur

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga miskin terhadap kelembagaan kesehatan, pendidikan, keuangan dan pemasaran serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rumah tangga miskin.

7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi rakyat yang dimiliki oleh rumah tangga miskin sehingga mereka dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan secara presisten berdasarkan mata pencaharian utama.

8. Redistribusi aset

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan aset/modal, akses, dan kontrol rumah tangga miskin terhadap lingkungan sumberdaya alam atau buatan melalui redistribusi aset/lahan sehingga tidak terjadi deprivasi lahan, ketimpangan penguasaan/kepemilikan sumberdaya alam/lahan oleh kelompok elite/pemodal.

Dalam mengukur kemiskinan, terdapat tiga indikator yang diperkenalkan oleh Foster dan sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, *the incidence of poverty* yaitu persentase dari populasi yang hidup di

dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Kedua, *the depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK) atau biasa dikenal dengan *poverty gap index*.

2.4 Teori Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dari sisi persepsi maupun sikap individu. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efisien yang ditinjau melalui sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan anggota, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha yang sesuai dengan tujuan rencana tersebut. Selain itu, efektivitas merujuk pada kaitan antara hasil yang telah dicapai, sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB III. METODE KAJIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah data Primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengumpulan survey, wawancara mendalam dan FGD kepada responden terkait dampak pandemi Covid-19. Data sekunder berasal dari Bappeda Kabupaten Tangerang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya yang dianggap dan relevan.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey dan indepth interview. Ruang lingkup survey akan dibatasi oleh kategori rumah tangga difokuskan pada rumah tangga yang diduga terdampak pandemi Covid 19. Pengumpulan data survey menggunakan kuesioner terstruktur. Intdepth interview dilakukan kepada stakeholder yang terkait dengan pengambil kebijakan di Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data sekunder berasal dari instansi-instansi terkait.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1. Review Data Sekunder (*secondary data review*)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur yaitu mengumpulkan berbagai data sekunder terkait ekonomi makro dari berbagai sumber untuk menangkap persoalan dan isu spesifik terkait Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Rasio Gini. Studi ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, baik studi-studi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, data BPS seperti Survei Sosial Ekonomi, Sensus Penduduk, dan survei BPS terkait, perguruan tinggi maupun instansi lainnya. Berdasarkan tujuan kajian, maka alat analisis yang akan digunakan dalam kajian ini yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Metode ini merupakan metode statistik yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat kajian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Data analisis disajikan dalam bentuk tabulasi, *charts*, dan diagram.

1. Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t

$$r = \frac{Y_{it} \times 100\%}{Y_{i(t-1)}} - 100\%$$

dengan:

r = Laju pertumbuhan ekonomi

Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t
(nominal)

$Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1
(nominal)

2. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

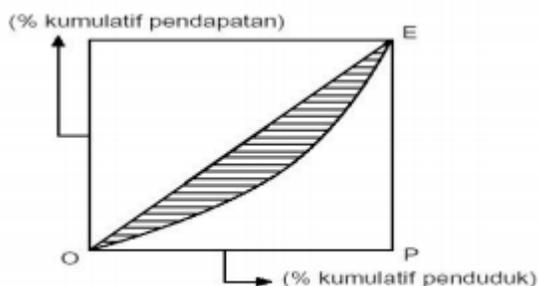
$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

3. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

4. Gini Ratio

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz (gambar)



Gambar 2. Kurva Lorenz

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir

Rumus Gini Ratio:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR= Koefisien gini

Fpi= frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci= frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu, berikut tabel patokan Nilai koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distibusi Pendapatan
< 0.4	Tingkat Ketimpangan rendah
0.4 – 0.5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0.5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

6. Analisis Proyeksi

Analisis proyeksi dilakukan untuk setiap indikator makro di Kabupaten Tangerang. Analisis proyeksi dilakukan menggunakan software Minitab 20. Dimana hasil proyeksi dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu skenario pesimis, moderat dan growth. Dalam melakukan interpretasi hasil proyeksi, digunakan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang menunjukkan

ukuran kesalahan relatif. MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil pendugaan atau peramalan terhadap hasil aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah, dengan kata lain MAPE merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu yang kemudian dikalikan 100% agar mendapatkan hasil secara persentase.

MAPE merupakan ukuran ketepatan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan hasil pendugaan. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAPE mengindikasikan seberapa besar kesalahan dalam menduga yang dibandingkan dengan nilai nyata.

Rumus

Secara matematis, rumusnya ditulis sebagai berikut.

$$MAPE = \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{\hat{y}_t} \right| \times 100\%$$

Keterangan:

MAPE = mean absolute percentage error

n = jumlah data

y = nilai hasil aktual

\hat{y} = nilai hasil pendugaan

3.3.2 Review Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai masyarakat untuk menangkap kondisi sosial (kesehatan, pendidikan, pengangguran dan

kemiskinan), kondisi ekonomi (tingkat kesejahteraan dan pengeluaran rumah tangga) setelah adanya Covid-19. Selain itu, pengumpulan data primer digunakan untuk mengetahui efektifitas bantuan Covid-19 yang diterima masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data primer juga digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait strategi kebijakan yang harus dilakukan dalam melakukan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Tanrang. Berdasarkan tujuan kajian, maka alat analisis yang akan digunakan dalam kajian ini yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Metode ini merupakan metode statistik yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat kajian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Data analisis disajikan dalam bentuk tabulasi, *charts*, dan diagram.

2. Analisis Efektivitas

Tingkat keefektivitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung bagaimana cara menilai dan mengimpresifikannya. Apabila suatu pekerjaan dan hasil usaha tidak mencapai sasaran yang diharapkan, bisa dikatakan bahwa hal tersebut belum efektif, begitupun sebaliknya. Untuk mengukur keefektifan sebuah program dibutuhkan tiga indikator, diantaranya:

- 1) Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata
- 2) Integrasi, yaitu mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsekuensi, Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian antara program dengan keadaan dilapangan.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Sosial Masyarakat, yaitu Kondisi Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Kajian di lakukan di Kabupaten Tangerang terhadap 98 responden di beberapa lokasi kecamatan, diantaranya Kecamatan Jambe, Kecamatan Curug, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Kresek, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Keronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, dan Kecamatan Jayanti. Pemilihan lokasi di beberapa kecamatan ini dilakukan agar mendapatkan keberagaman data dan dapat menggambarkan setiap kondisi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Data sebaran jumlah responden per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Responden
1	Jambe	32
2	Curuh	12
3	Balaraja	10
4	Cisoka	7
5	Jayanti	7
6	Kronjo	4
7	Cikupa	2
8	Sepatan	2
9	Mekar Baru	2
10	Cisauk	3
11	Rajeg	2
12	Sukadiri	1

13	Kresek	1
14	Legok	1
15	Panongan	3
16	Keronjo	2
17	Mauk	1
18	Pagedangan	1
19	Sepatan Timur	1
20	Sindang Jaya	1
21	Jayanti	3
	Jumlah Responden	98

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden pada kajian ini memiliki tingkat pendidikan SMU (39,8%), dan SLTP (28,57%). Tingkat pendidikan yang paling rendah jumlah respondennya yaitu Sarjana sebanyak 4,08%. SEbaran tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Tangerang

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S1	4	4.08%
SMU	39	39.80%
SLTP	28	28.57%
SD	21	21.43%
Tidak Sekolah	6	6.12%
Jumlah Responden	98	100%

Pandemi Covid yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Tangerang. Terjadi beberapa perubahan kondisi sosial masyarakat sebagai dampak dari adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ketika awal terjadi pandemi pemerintah menerapkan sistem *lockdown* di beberapa lokasi, sehingga menghambat kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, responden di kabupaten Tangerang yang memiliki BPJS sebanyak 61 orang (62,24%), sedangkan responden yang tidak memiliki BPJS sebanyak 37 orang (37,76%). Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat masyarakat yang masih tidak memiliki jaminan kesehatan dan kondisi ini menjadi riskan ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Kondisi kecukupan terhadap akses pendidikan selama pandemic dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan hasil kajian, dalam kondisi pandemi Covid-19, masyarakat sebagian besar (66%) merasa bahwa kebutuhan pendidikan cukup terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mempertahankan kebutuhan pendidikan melalui kemudahan akses untuk dapat tetap sekolah seperti bantuan kuota internet sangat bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat 34% masyarakat yang merasa kebutuhan pendidikan di masa pandemi belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan tidak semua metode belajar dari rumah sesuai dengan kondisi masyarakat. Tidak semua orang tua dapat mendampingi anak belajar di rumah, karena orang tua yang masih tetap harus bekerja.



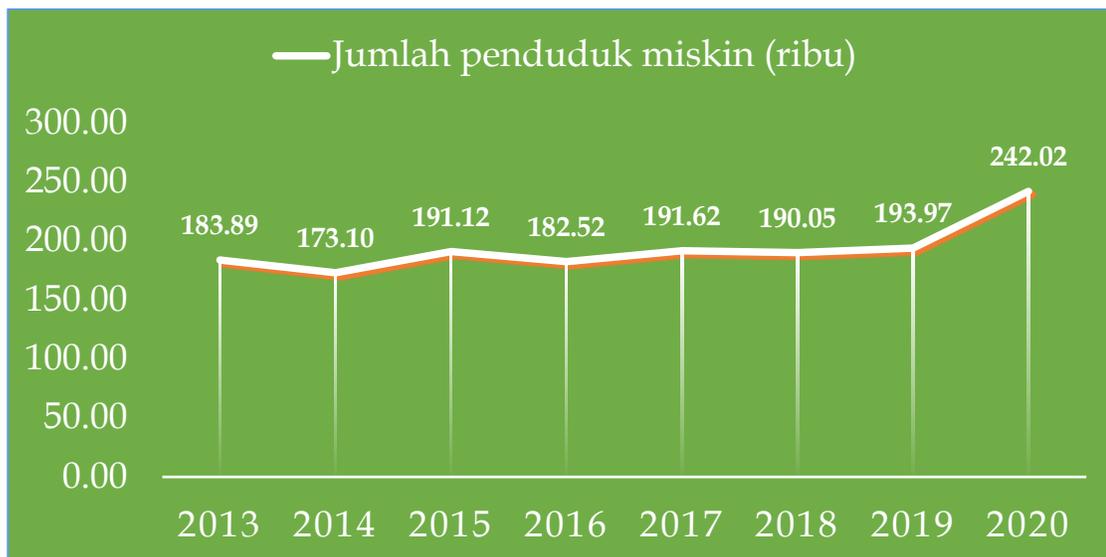
Gambar 3. Ketercukupan Kebutuhan Pendidikan Masyarakat Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang

Selain berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakat melalui akses kesehatan dan pendidikan, pandemi Covid-19 di Kabupaten Tangerang berdampak pada kondisi pekerjaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang tidak bekerja menjadi dua kali lipat. Hal ini terjadi karena beberapa pekerjaan seperti wirausaha offline yang tidak dapat membuka usaha karena terdapat pembatasan dari pemerintah, pegawai/ pekerja dan buruh lepas yang mengalami pemberhentian kerja. Penurunan jumlah masyarakat yang bekerja di sektor wirausaha offline, pekerja dan buruh lepas yaitu sebesar 2,04%. Namun, hal yang menarik dalam kondisi perubahan pekerjaan masyarakat adalah adanya kemampuan beradaptasi masyarakat untuk beralih ke usaha di sektor pertanian, perikanan, dll. Dalam kajian ini, terdapat 22,22% peningkatan jumlah masyarakat yang beralih ke sektor pertanian. Sebaran jumlah pekerjaan masyarakat pada sebelum pandemic dan sesudah pandemic dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah pekerjaan masyarakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Sebelum Pandemi	Jumlah Setelah Pandemi
1	Wirausaha Offline	35	33
2	Pegawai/ Pekerja	27	25
3	Buruh Lepas	8	6
4	Ojek/Sopir	5	6
5	Wirausaha Online	5	4
6	Petani/dll	9	11
7	Guru/Dosen Swasta/dll	3	3
8	Horeka	1	2
9	ASN/BUMN/dll	2	2
10	Tidak Bekerja	3	6
	Jumlah Responden	98	98

Secara umum, tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang dari tahun 2013 sampai tahun 2020 berfluktuatif (BPS Kab. Tangerang 2021). Pada tahun 2019 ke tahun 2020 (tahun awal pandemi) terdapat peningkatan yang cukup tinggi untuk jumlah penduduk miskin di Kab. Tangerang, yaitu mencapai 24,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi awal pandemi berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena menurunnya daya beli masyarakat. Tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tren Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tangerang

Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menyebabkan *shock* di berbagai sektor ekonomi, dimana salah satu dampaknya adalah penutupan usaha yang selanjutnya berimplikasi pada PHK. Kondisi ini mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Tangerang tahun 2020 meningkat 4,14 persen dari tahun 2019. Kabupaten Tangerang dapat menekan TPT pada tahun 2019, hanya sebesar 8,92% namun adanya pandemi menyebabkan TPT di

Kabupaten meningkat kembali pada tingkat 13,06%. Gambar 3 menunjukkan tren TPT di Kabupaten Tangerang.

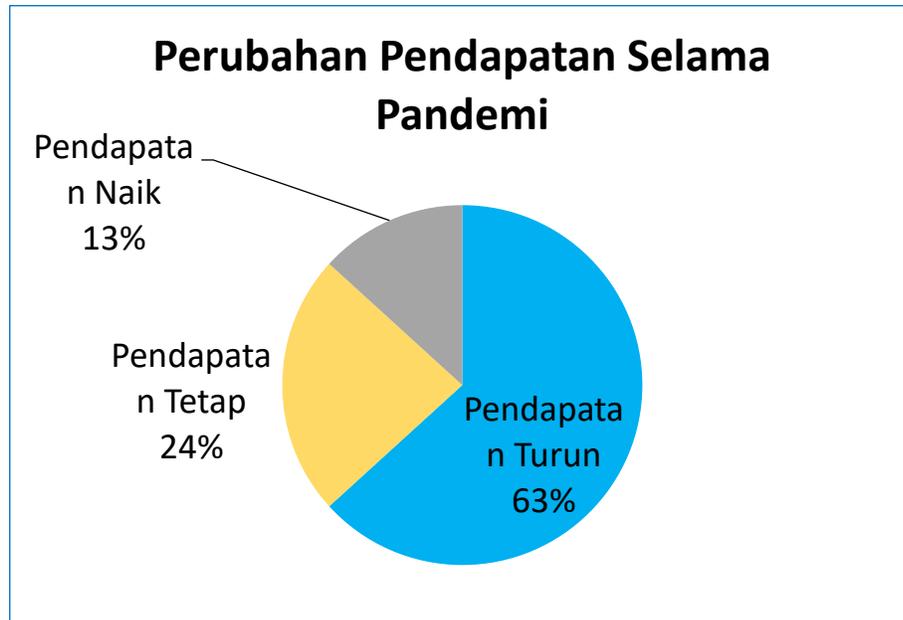


Gambar 5. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang

4.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat, yaitu Kesejahteraan dan Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Tangerang

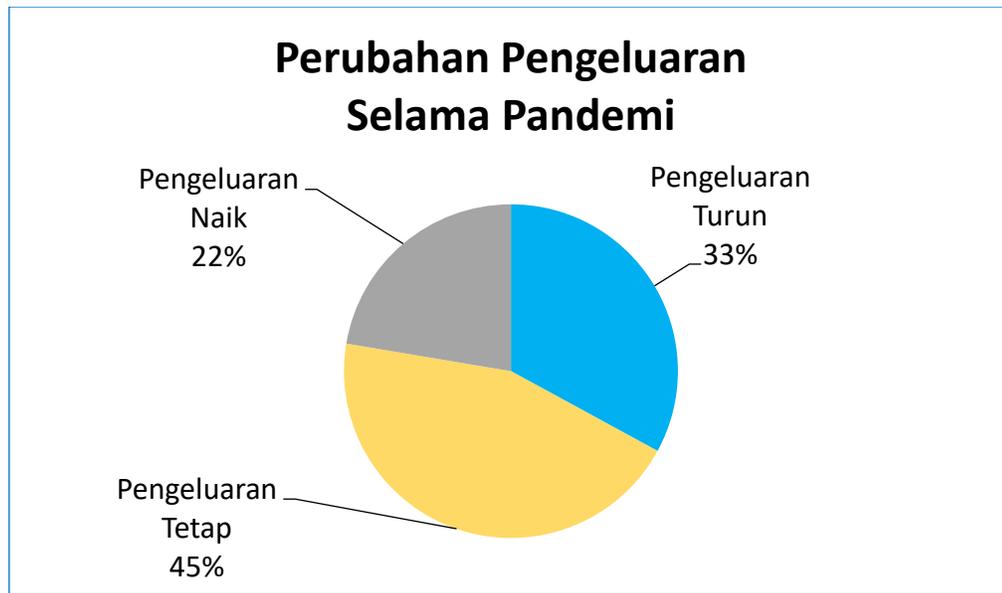
Berdasarkan kajian, dampak pandemi terhadap perubahan pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat (63%) mengalami penurunan, dikarenakan adanya pengurangan karyawan, berhentinya usaha, terhambatnya aktivitas ekonomi karena PPKM. Beberapa masyarakat tidak mengalami perubahan pendapatan (sebanyak 24%) terutama yang bekerja di sektor pangan (bertani), atau pegawai negeri. Masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan (sebanyak 13%) sebagian besar membuka usaha dagang atau warung di rumah. Dalam hal ini jelas terlihat sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, sedangkan yang dapat bertahan adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai

pegawai negeri sipil dan masyarakat yang mampu beradaptasi untuk bekerja di sektor pertanian atau membuka usaha online.



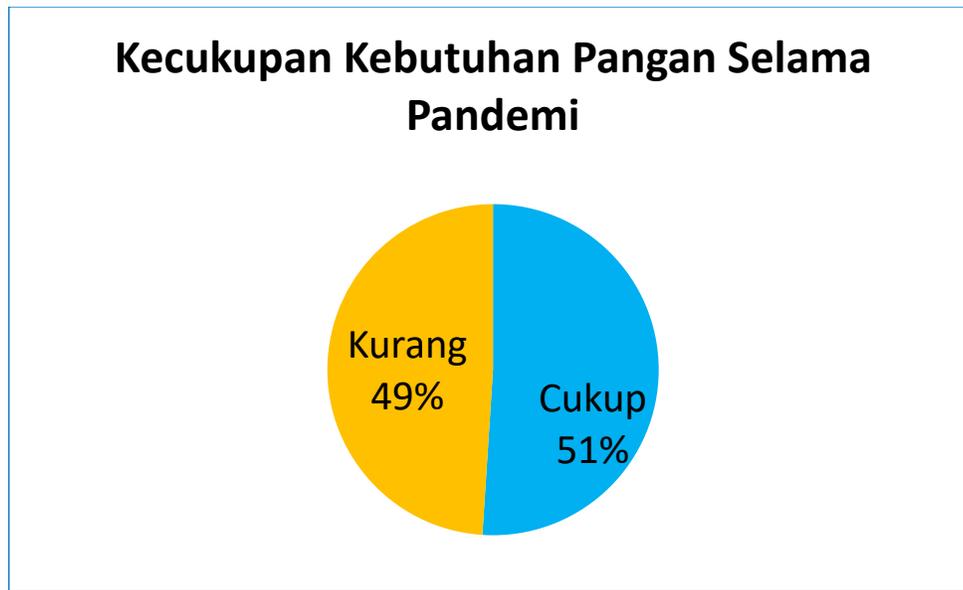
Gambar 6. Dampak Pandemi Covid terhadap Perubahan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan kajian, dampak pandemi terhadap perubahan pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengalami perubahan pengeluaran (sebanyak 45%), hal ini karena baik sebelum pandemi maupun di saat pandemi kebutuhan utama seperti pangan dan rumah tangga (listrik) tidak dapat dikurangi. Sebanyak 33% masyarakat mengalami penurunan pengeluaran, karena harus menyesuaikan dengan pendapatan yang menurun. Meskipun demikian, terdapat sebanyak 22% masyarakat mengalami peningkatan pengeluaran disebabkan karena harga-harga kebutuhan sehari-hari meningkat. Pengeluaran terbesar di masa pandemi: pangan, kopi/rokok, pulsa telpon dan kuota internet, BBM, air, dan listrik.



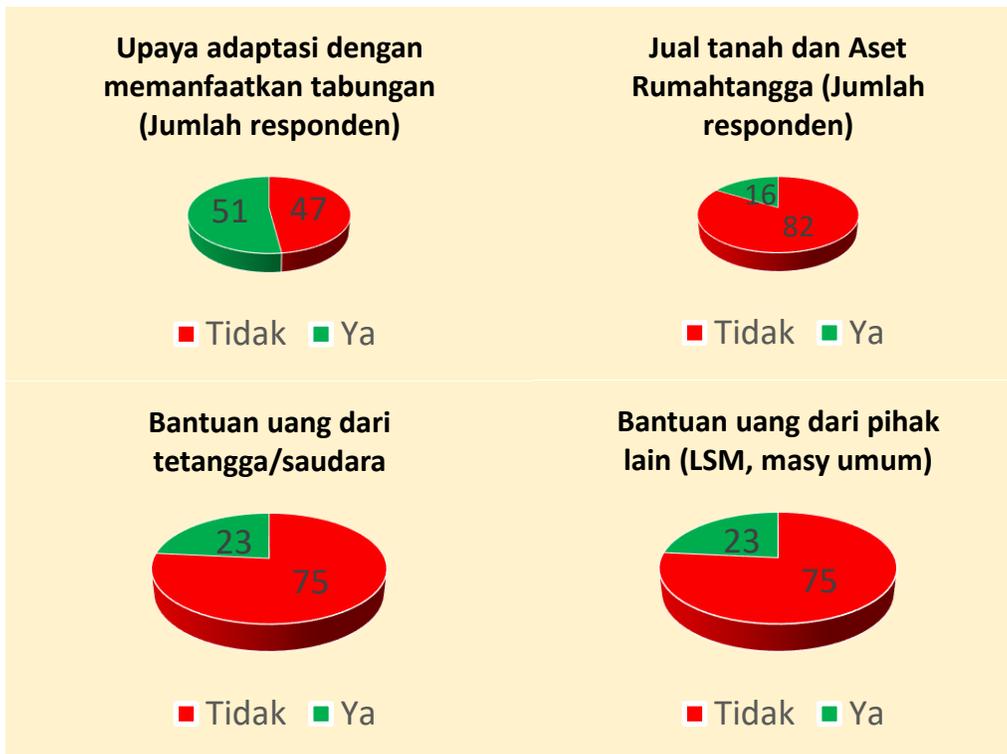
Gambar 7. Dampak Pandemi Covid terhadap Perubahan Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Tangerang

Dalam kondisi pandemi Covid-19, masyarakat sebagian besar (51%) merasa bahwa kebutuhan pangan cukup terpenuhi. Hal ini dikarenakan masyarakat berupaya tidak mengurangi kebutuhan pangan utamanya, selain itu bagi petani kebutuhan pangan dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Namun demikian, masih terdapat 49% masyarakat yang merasa kebutuhan pangan di masa pandemi belum terpenuhi. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya adalah yang tidak memiliki lahan untuk menggarap tanaman pangan dan tidak memiliki daya beli akibat adanya pandemi.



Gambar 8. Dampak Pandemi Covid terhadap Ketercukupan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tangerang

Masyarakat di Kabupaten Tangerang melakukan berbagai upaya adaptasi agar dapat bertahan hidup di masa pandemi. Sebanyak 47 orang (47,96%) masyarakat menyatakan beradaptasi dengan menggunakan tabungan yang dimilikinya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 16 orang (16,33%) menjual tanah dan asset rumah tangga lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Terdapat 23 orang (23,47%) masyarakat mendapatkan bantuan dari saudara atau tetangga dalam memenuhi kebutuhannya, begitu juga dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses bantuan dari lembaga sosial masyarakat maupun bantuan umum lainnya termasuk pinjaman online.



Gambar 9. Upaya Adaptasi Masyarakat Selama Pandemi Covid di Kabupaten Tangerang

4.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

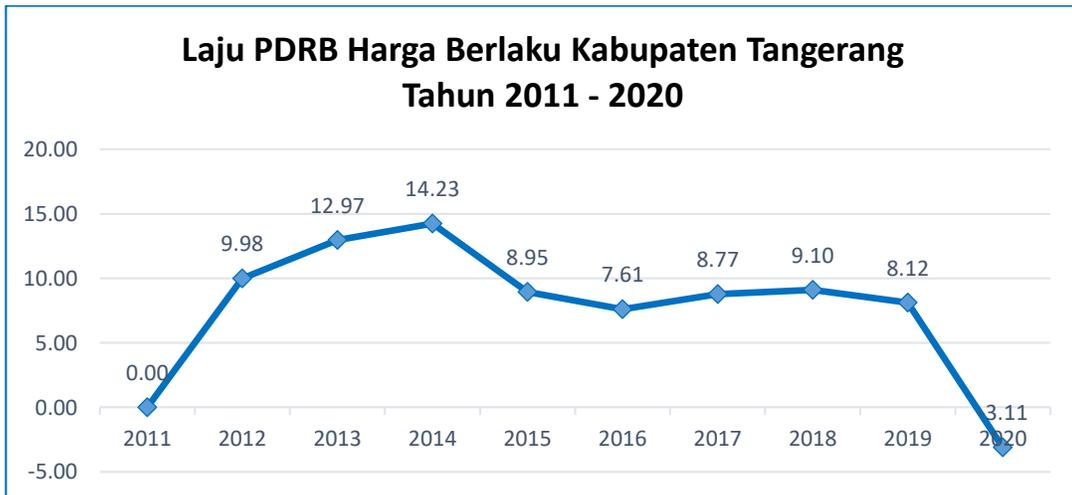
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Tangerang mengalami tren peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019 mencapai Rp 140.366,14 Miliar. Tahun 2020 menurun akibat pandemi Covid-19 dengan PDRB sebesar Rp 136.005,32 Miliar. Hal ini diduga karena kegiatan ekonomi semua sektor menurun.



Gambar 10. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2020

Berdasarkan harga berlaku, Laju PDRB Kabupaten Tangerang tertinggi di tahun 2014 yaitu mencapai 14,23%. Hal ini diduga karena tahun 2014 terjadi inflasi yang cukup tinggi, sehingga harga-harga mengalami peningkatan. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi -3,11% akibat pandemi Covid-19.



Gambar 11. Laju PDRB Harga Berlaku Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2020

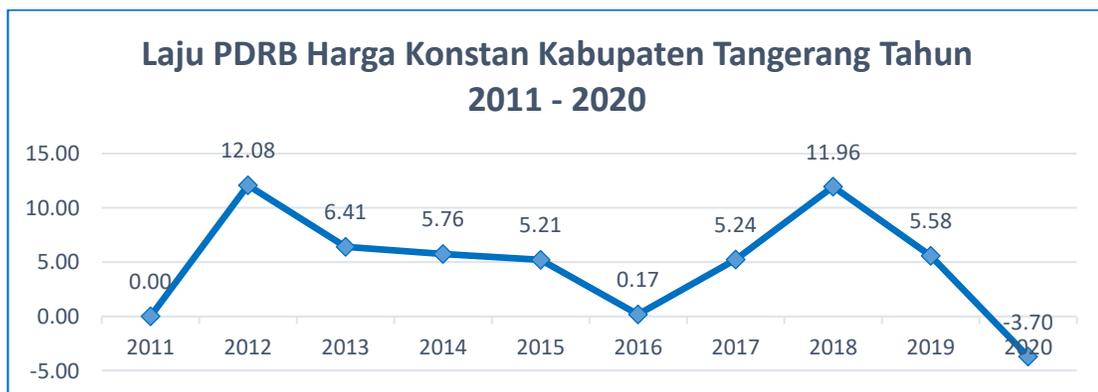
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Berdasarkan harga konstan, PDRB Kabupaten Tangerang memiliki tren meningkat hingga tahun 2019, meskipun peningkatan pada tahun 2016 hanya sedikit. Tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.



**Gambar 12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tangerang
Tahun 2011 – 2020**

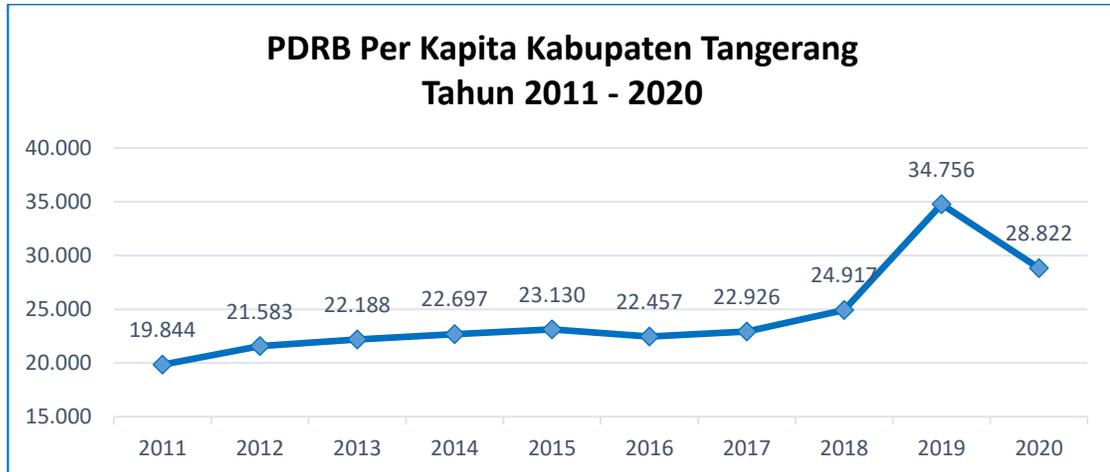
Berdasarkan harga konstan, Laju PDRB Kabupaten Tangerang tertinggi di tahun 2012 dan tahun 2018. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari sektor *real estate* sebesar 9,41% (BPS Kab. Tangerang, 2020). Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi -3,7 persen akibat pandemi Covid-19.



**Gambar 13. Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tangerang Tahun
2011 – 2020**

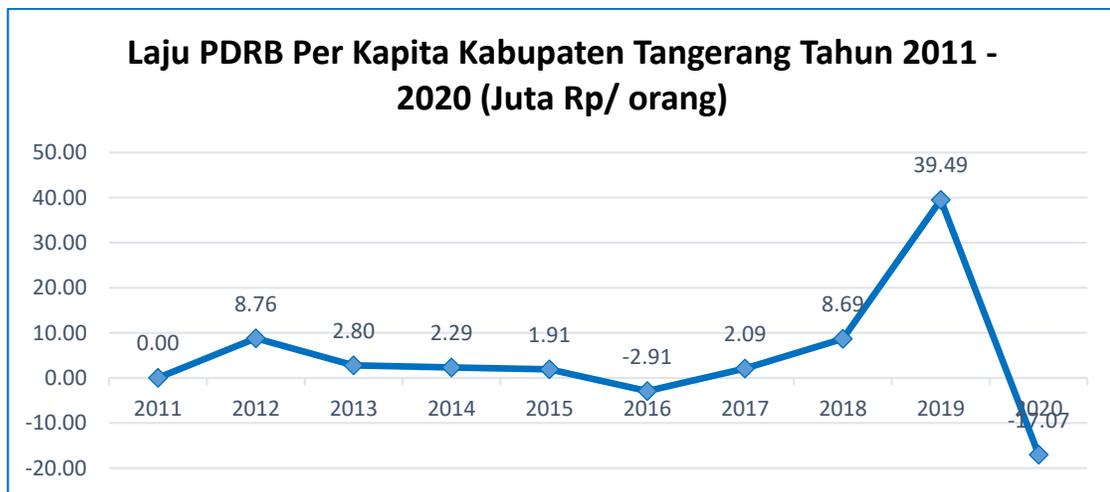
3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kab. Tangerang sempat meningkat dari tahun 2011 hingga 2015, namun melandai di tahun 2016 dan 2017 kemudian meningkat di tahun 2019, namun pandemi Covid-19 menyebabkan PDRB per kapita Kab. Tangerang mengalami penurunan.



Gambar 14. PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

Laju PRDB per kapita Kab. Tangerang meningkat tajam di tahun 2012, hal ini dikarenakan nilai PDRB Kab. Tangerang tahun 2020 meningkat tajam.



Gambar 15. PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM sebagai indikator suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkesinambungan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM Kabupaten Tangerang berada pada kategori sedang ($60 < \text{IPM} < 80$). IPM Kab. Tangerang sempat mengalami penurunan tahun 2011 karena daya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menurun kemudian meningkat kembali hingga tahun 2019, sedangkan tahun 2020 mengalami sedikit penurunan.



Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

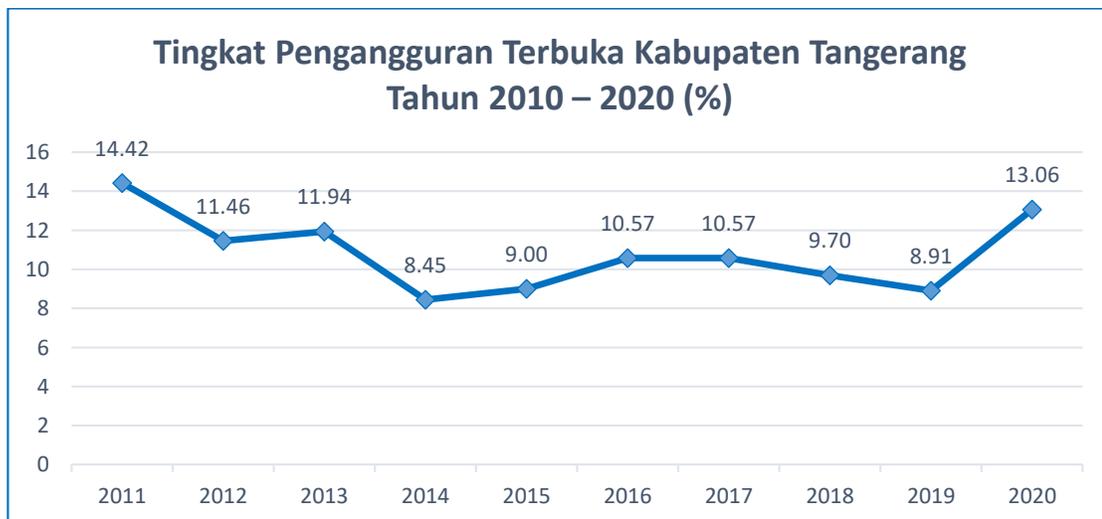
Dalam 10 tahun terakhir, laju IPM Kab. Tangerang menurun ketika tahun 2011 dan tahun 2020. Beberapa faktor yang dapat menurunkan laju IPM diantaranya: kontribusi daya beli masyarakat yang relatif rendah, produktivitas sektoral yang relatif rendah sehingga tenaga kerja memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, dan jumlah penduduk miskin yang relatif stagnan.



Gambar 17. Laju Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

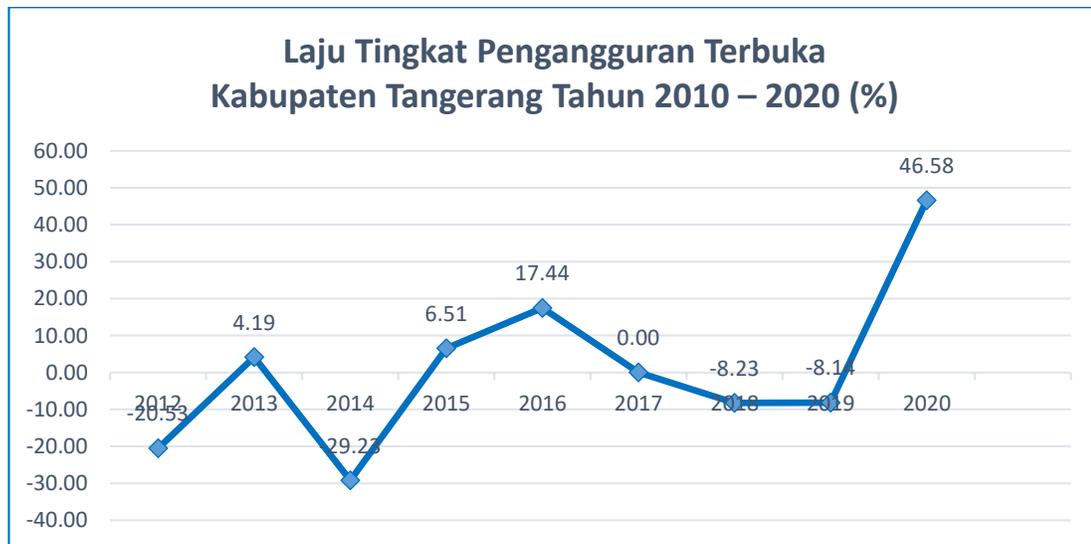
4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Tangerang fluktuatif, sempat mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan tingkat pengangguran meningkat hingga 13.06%.



Gambar 18. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

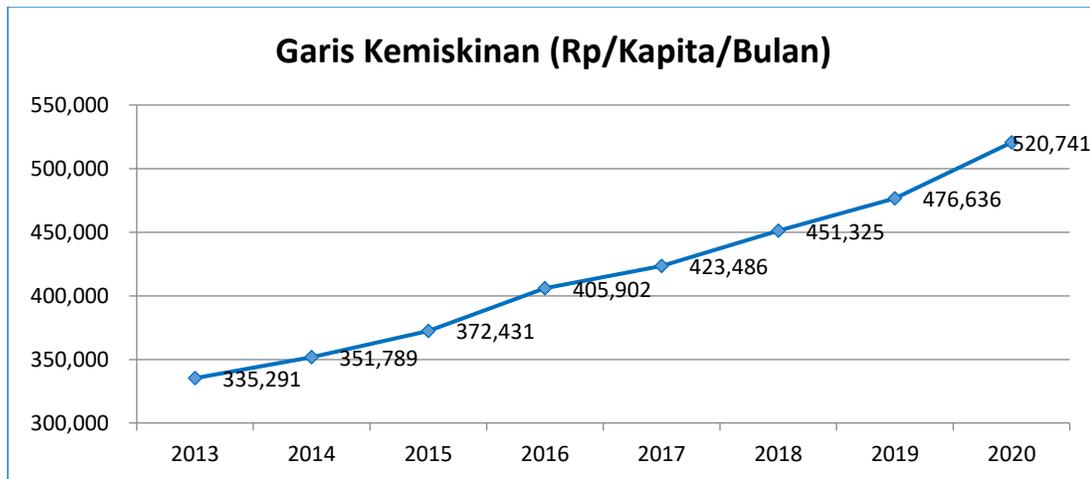
Laju peningkatan TPT Kab. Tangerang akibat Covid sebesar 46.58%, hal ini menunjukkan pandemi sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena beberapa sektor perekonomian seperti sektor industri, perhotelan, rumah makan dan usaha lainnya mengurangi jumlah tenaga kerja untuk bertahan di masa pandemi.



Gambar 19. Laju Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

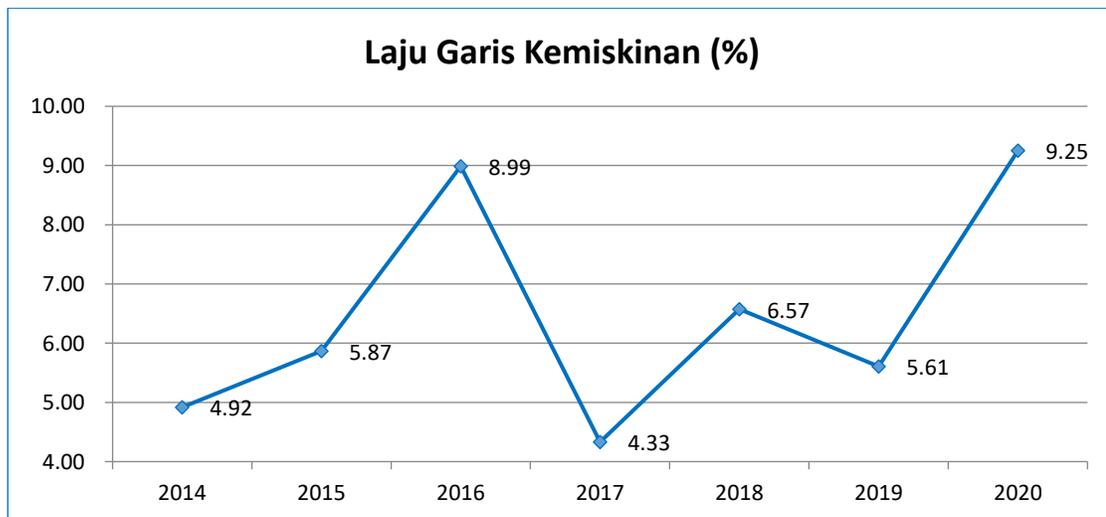
4.1.3 Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemsikinan di Kab. Tangerang yang semakin meningkat diduga dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.



Gambar 20. Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

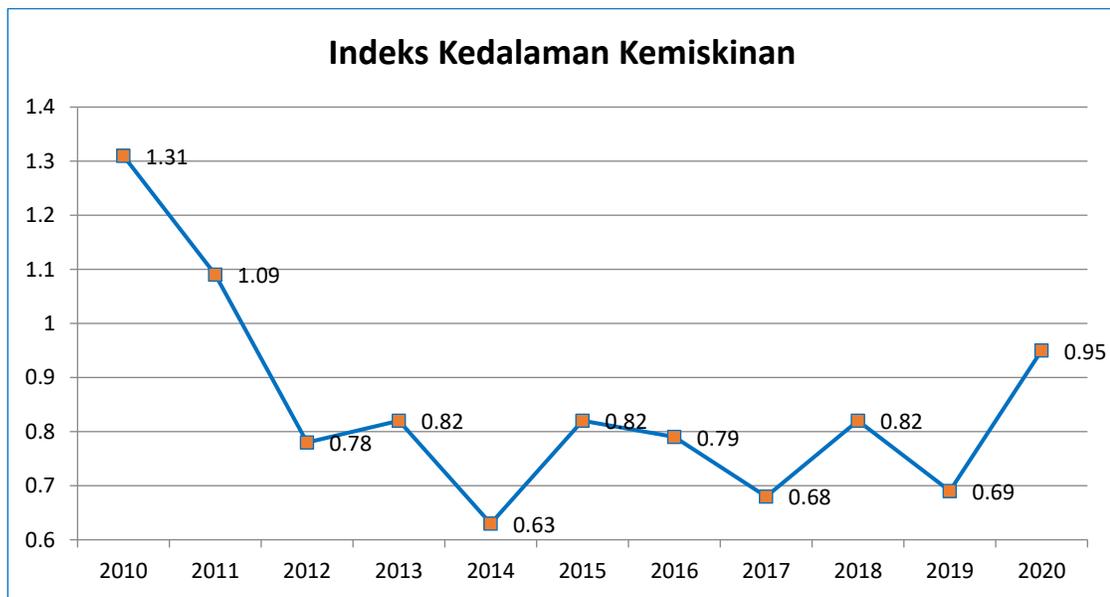
Laju garis kemiskinan di Kab. Tangerang selama tahun 2014-2020, mengalami puncak di tahun 2020. Hal ini diduga karena pandemi Covid-19 terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan baik makanan maupun non-makanan. Total jumlah angka kemiskinan Kab. Tangerang tahun 2020 meningkat hingga 6,23% (<https://cnbanten.id>)



Gambar 21. Laju Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

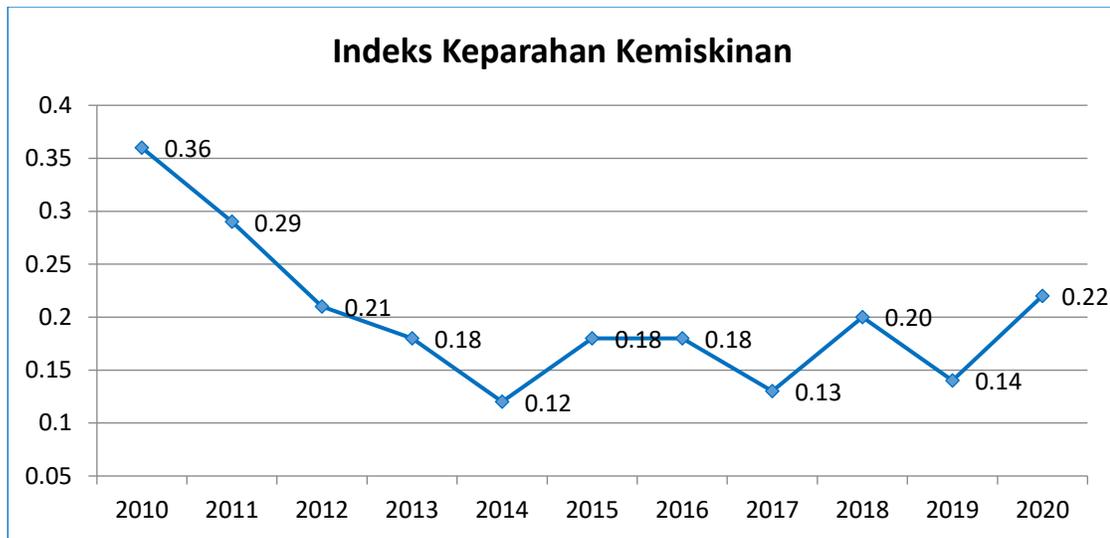
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kab. Tangerang cenderung fluktuatif, sempat mengikuti tren menurun hingga tahun 2019 namun meningkat kembali di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.



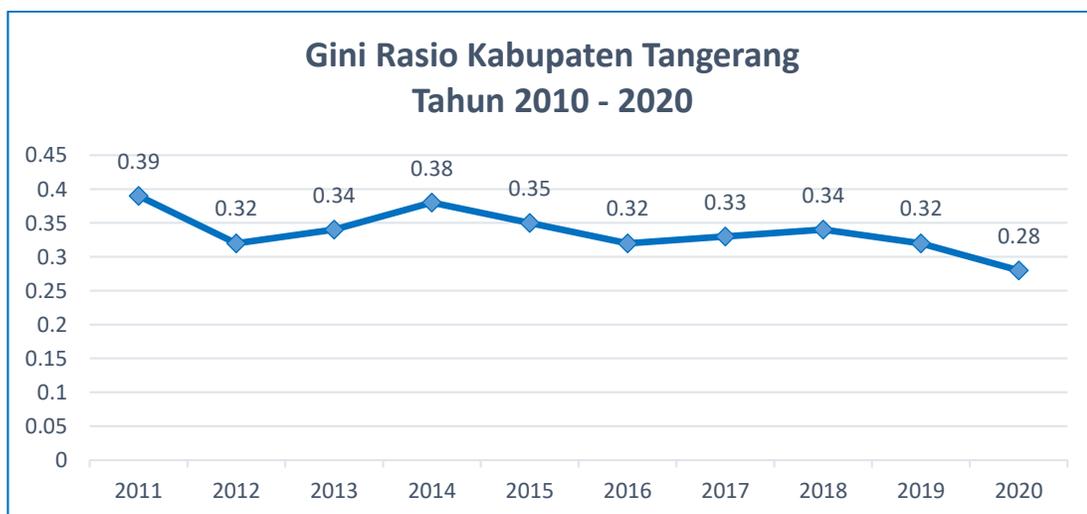
Gambar 22. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

Indeks ketimpangan kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan di Kab. Tangerang mengalami tren penurunan dari tahun 2010 hingga 2014, namun kemudian berfluktuasi hingga di tahun 2020 meningkat kembali. Hal ini diduga karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga ketimpangan pengeluaran semakin besar.



Gambar 23. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

Gini rasio merupakan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Gini rasio di Kab. Tangerang cenderung memiliki tren menurun di tahun 2020, hal ini menunjukkan kondisi positif dimana ketimpangan pendapatan semakin rendah. Namun perlu dipastikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk yang terjadi akibat adanya penurunan level pendapatan masyarakat.



Gambar 24. Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

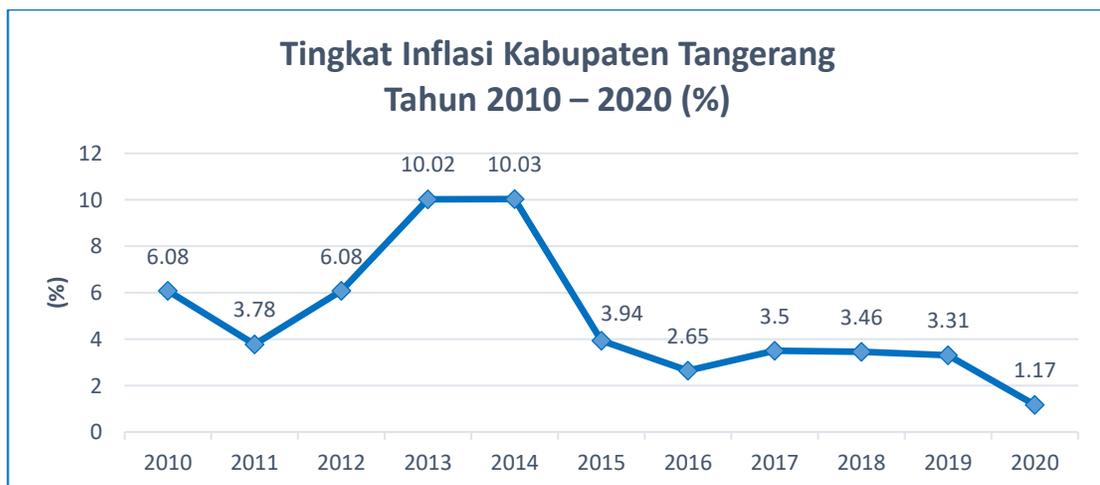
Laju gini rasio di Kab. Tangerang mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun gini rasio menurun, namun belum menunjukkan pertumbuhan positif sehingga ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kab. Tangerang tetap perlu diperhatikan terutama di masa pandemi.



Gambar 25. Laju Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

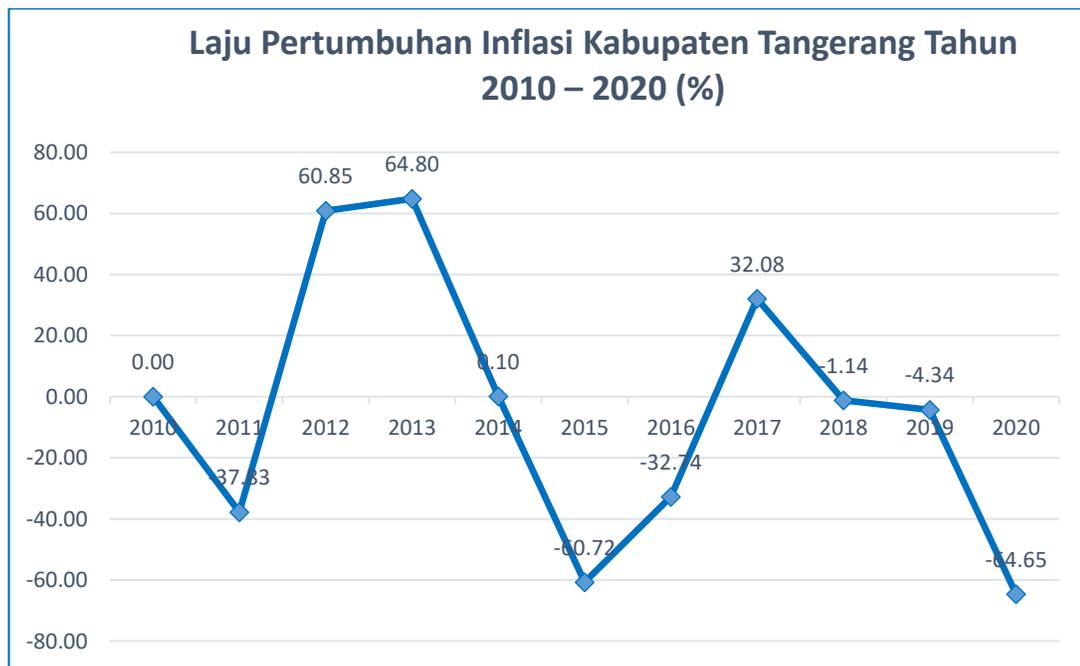
4.1.4 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi menunjukkan terjadinya kenaikan inflasi di tahun 2013 dan 2014, namun tingkat inflasi tahun 2020 menurun ketika terjadi pandemi Covid-19.



Gambar 26. Tingkat Inflasi Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

Laju inflasi di Kab. Tangerang memiliki tren fluktuatif, kemudian berada pada posisi negatif sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan tingkat pengendalian inflasi di Kab. Tangerang relatif berhasil menekan laju inflasi.

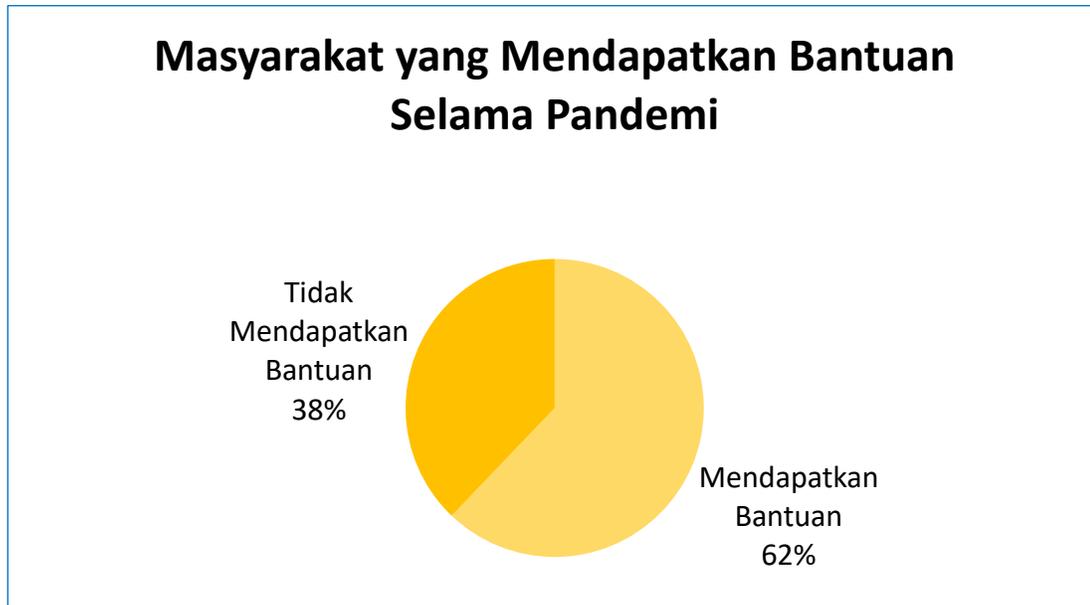


Gambar 27. Tingkat Inflasi Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2020

4.2 Efektifitas Bantuan Pemerintah dalam Menggerakkan Ekonomi Makro Kabupaten Tangerang

Efektifitas bantuan selama pandemi merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan kajian sehingga dapat terlihat apakah bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi dapat menjadi solusi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di Kab Tangerang. Dalam kajian ini, efektifitas bantuan dilihat dari persepsi responden terhadap bantuan sosial yang sudah diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19. Berdasarkan Gambar di bawah, sebagian besar masyarakat (sebanyak

62%) mendapatkan bantuan selama pandemi, sedangkan 38% tidak mendapatkan bantuan.



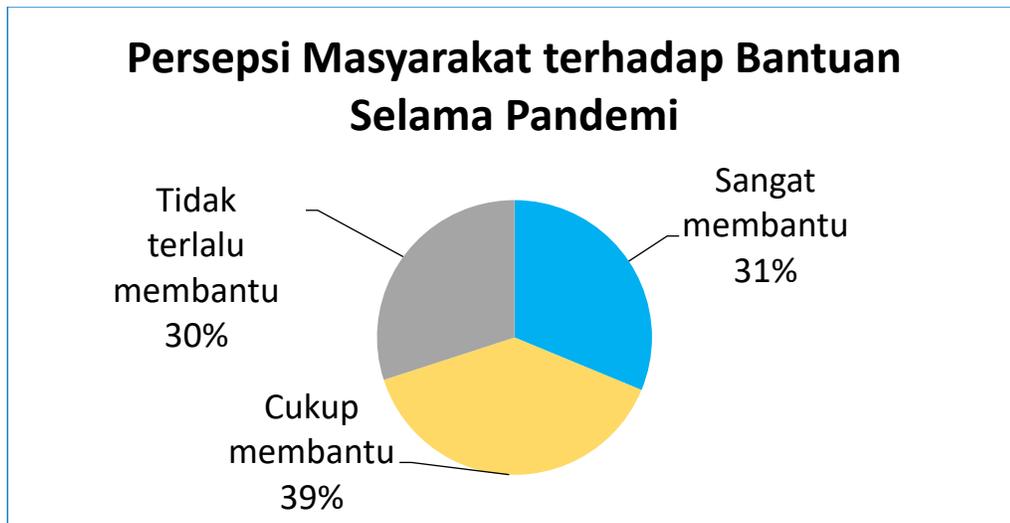
Gambar 28. Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang

Dari 98 responden masyarakat, sebanyak 33 orang (33,67%) tidak mendapatkan bantuan apapun selama pandemi. Untuk responden masyarakat yang menerima bantuan, sebanyak 23 orang (23,47%) mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST), selanjutnya Bantuan Langsung Tunai sebanyak 14 orang (14,29%). Sisanya adalah bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan, potongan biaya listrik, bantuan dari BUMN, bantuan untuk UMKM, dan bantuan kuota internet.



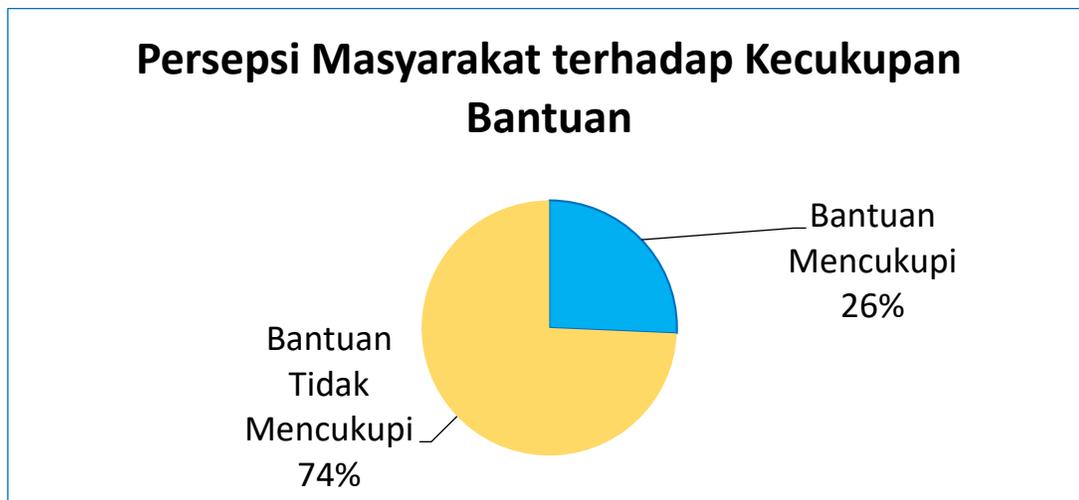
Gambar 29. Jumlah Responden yang Mendapatkan Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil survey, persentase persepsi masyarakat terhadap bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang ada belum cukup tepat sasaran. Masih terdapat 30% masyarakat yang merasa bantuan yang telah diterima belum cukup membantu memenuhi kebutuhan di masa pandemi.



Gambar 30. Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil survey, sebagian besar masyarakat (sebanyak 74%) merasa bantaun yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Terdapat 26% masyarakat yang merasa bantuan yang telah diterima sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bagi kebutuhan pangan kesehatan maupun pendidikan.



Gambar 31. Persepsi Masyarakat terhadap Kecukupan Bantuan Selama Pandemi di Kabupaten Tangerang

4.4. Hasil Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

4.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

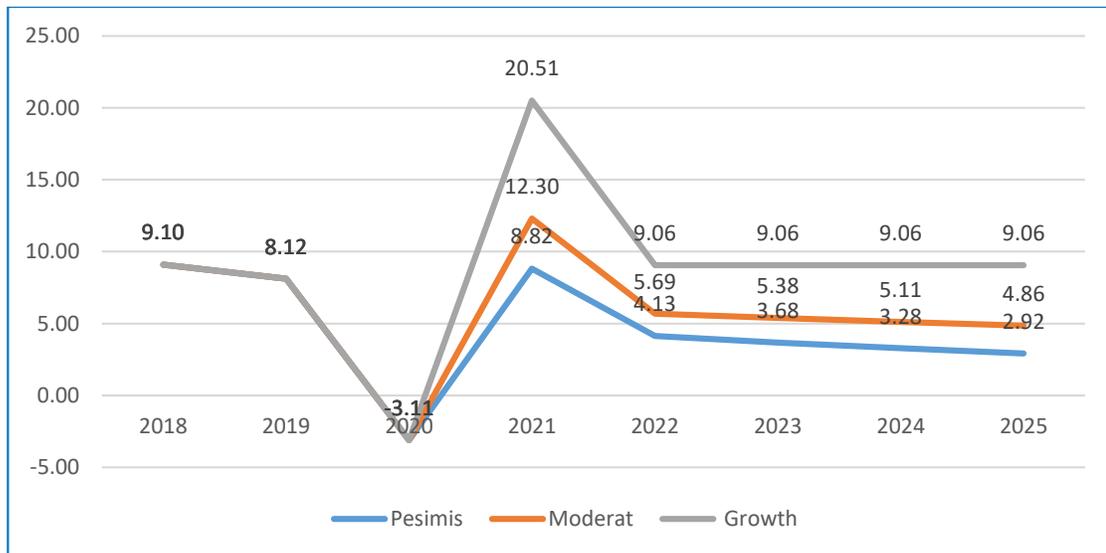
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Berdasarkan tiga skenario, PDRB harga berlaku Kab. Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2025. Tahun 2021 perekonomian meningkat karena berbagai upaya adaptasi yang dilakukan di masa pandemi. Skenario moderat memiliki nilai *error* terkecil, yaitu 2,05%.

Tabel 4. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

PDRB Harga Berlaku (Milliar Rp)	Pesimis	Moderat	Growth
2017	118,994,080	118,994,080	118,994,080
2018	129,825,980	129,825,980	129,825,980
2019	140,366,140	140,366,140	140,366,140
2020	136,005,320	136,005,320	136,005,320
2021*	148,002,619	152,739,190	163,904,380
2022*	154,111,788	161,431,943	178,749,364
2023*	159,790,360	170,124,696	194,938,873
2024*	165,038,334	178,817,449	212,594,682
2025*	169,855,711	187,510,202	231,849,595
MAPE (%)	2,08	2,05	3,79

Berdasarkan 3 skenario, proyeksi laju PDRB harga berlaku Kab. Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah melakukan beberapa kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.



Gambar 32. Proyeksi Laju PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

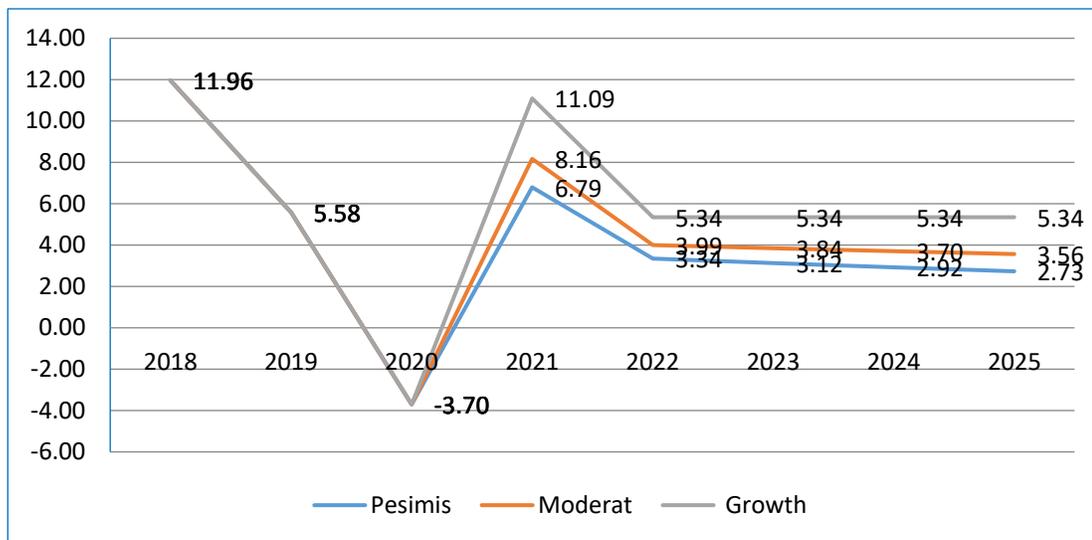
Berdasarkan tiga skenario, PDRB harga konstan Kab. Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2025. Tahun 2021 perekonomian meningkat karena berbagai upaya adaptasi yang dilakukan di masa pandemi. Skenario moderat memiliki nilai *error* terkecil, yaitu 2,63%.

Tabel 5. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

PDRB Harga Konstan (Milliar Rp)	Pesimis	Moderat	Growth
2017	82,183,600	82,183,600	82,183,600
2018	92,011,400	92,011,400	92,011,400
2019	97,142,200	97,142,200	97,142,200
2020	93,544,930	93,544,930	93,544,930
2021*	99,896,593	101,181,251	103,918,830
2022*	103,234,231	105,219,611	109,467,533
2023*	106,455,082	109,257,971	115,312,507
2024*	109,559,145	113,296,331	121,469,570

PDRB Harga Konstan (Milliar Rp)	Pesimis	Moderat	Growth
2025*	112,546,422	117,334,690	127,955,388
MAPE	2,63	2,80	3,12

Berdasarkan 3 skenario, proyeksi laju perekonomian Kab. Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah melakukan beberapa kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19. Kebijakan peningkatan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, kebijakan stabilisasi harga, kebijakan operasional sektor industri, restoran dan hotel sesuai dengan protokol kesehatan dapat membantu memulihkan perekonomian di Kab. Tangerang.



**Gambar 33. Proyeksi Laju PDRB Atas Harga Konstan di Kabupaten
Tangerang**

4.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

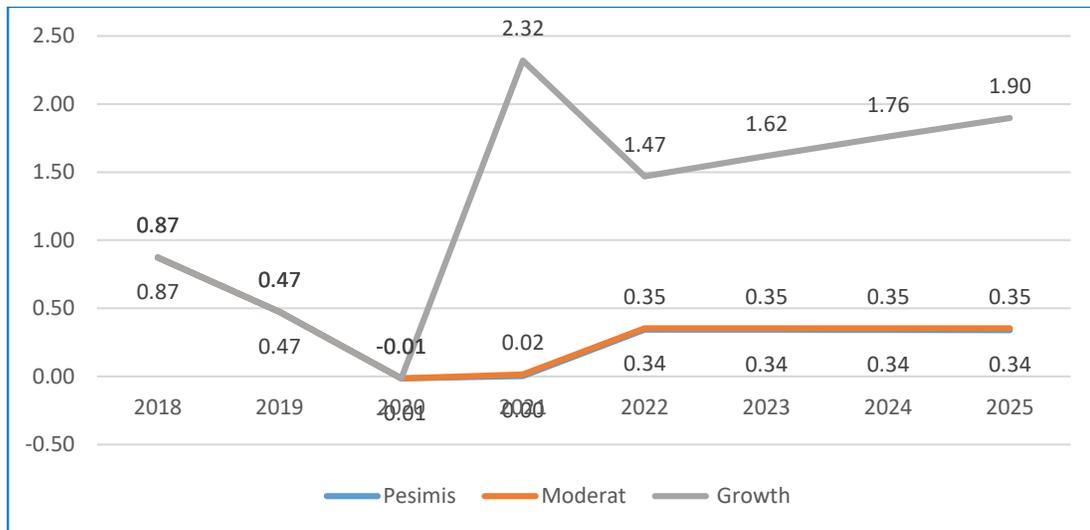
IPM Kab. Tangerang diproyeksikan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 berdasarkan 3 skenario. Skenario *growth* memiliki error terkecil yaitu 0,829 menunjukkan bahwa dengan berbagai strategi peningkatan indeks

pembangunan masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, pendapatan dapat meningkat hingga mencapai 78,68 di tahun 2025.

**Tabel 6. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025**

Indeks Pembangunan Masyarakat	Pesimis	Moderat	Growth
2017	70.97	70.97	70.97
2018	71.59	71.59	71.59
2019	71.93	71.93	71.93
2020	71.92	71.92	71.92
2021*	71.92	71.93	73.59
2022*	72.17	72.19	74.67
2023*	72.42	72.44	75.88
2024*	72.67	72.70	77.21
2025*	72.91	72.95	78.68
MAPE	0.971	0.965	0.829

IPM Kab. Tangerang menurun ketika tahun 2011 dan tahun 2020. Beberapa faktor yang dapat menurunkan laju IPM diantaranya: kontribusi daya beli masyarakat yang relatif rendah, produktivitas sektoral yang relatif rendah sehingga tenaga kerja memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, dan jumlah penduduk miskin yang relatif stagnan. Meskipun laju IPM Kab. Tangerang mengalami penurunan hingga tahun 2019, namun dapat meningkat jika didukung oleh upaya pemerintah terlebih dalam strategi adaptasi di masa pandemi Covid-19. Dengan skenario *growth*, laju peningkatan IPM Kab. Tangerang di berada diantara 1% - 2% hingga tahun 2025.



Gambar 34. Proyeksi Laju Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang

4.4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

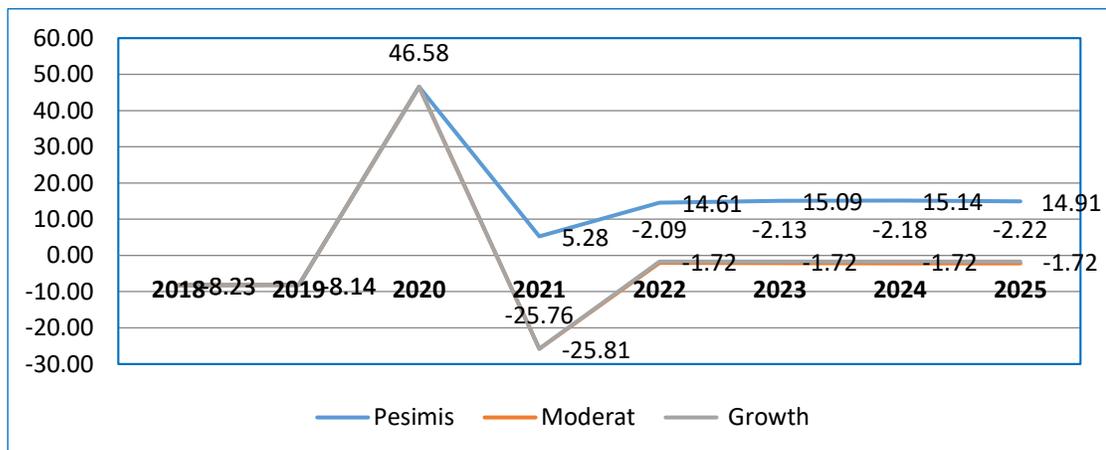
Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Tangerang diproyeksikan akan mengalami penurunan berdasarkan skenario moderat dan growth, namun dapat mengalami peningkatan yang cukup besar jika mengikuti skenario pesimis. Skenario pesimis dapat diatasi jika pemerintah dapat mengatasi masalah pengangguran. Bantuan modal usaha bagi UMKM merupakan salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran.

Tabel 7. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

TPT (%)	Pesimis	Moderat	Growth
2017	10.57	10.57	10.57
2018	9.70	9.70	9.70
2019	8.91	8.91	8.91
2020	13.06	13.06	13.06
2021*	13.75	9.70	9.69
2022*	15.76	9.49	9.52
2023*	18.14	9.29	9.36

TPT (%)	Pesimis	Moderat	Growth
2024*	20.88	9.09	9.20
2025*	24.00	8.89	9.04
MAPE	9.70	12.29	12.11

Laju TPT di Kab. Tangerang tahun 2020 meningkat tinggi, namun berdasarkan hasil proyeksi hal ini dapat ditekan di tahun 2021 karena pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran dengan berbagai skema adaptasi pandemi Covid-19. Tahun 2020, laju TPT pada 3 skenario mengalami penurunan. Meskipun pada skenario pesimis, laju TPT positif namun angka ini lebih rendah ketika di tahun 2020.



Gambar 35. Proyeksi Laju Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang

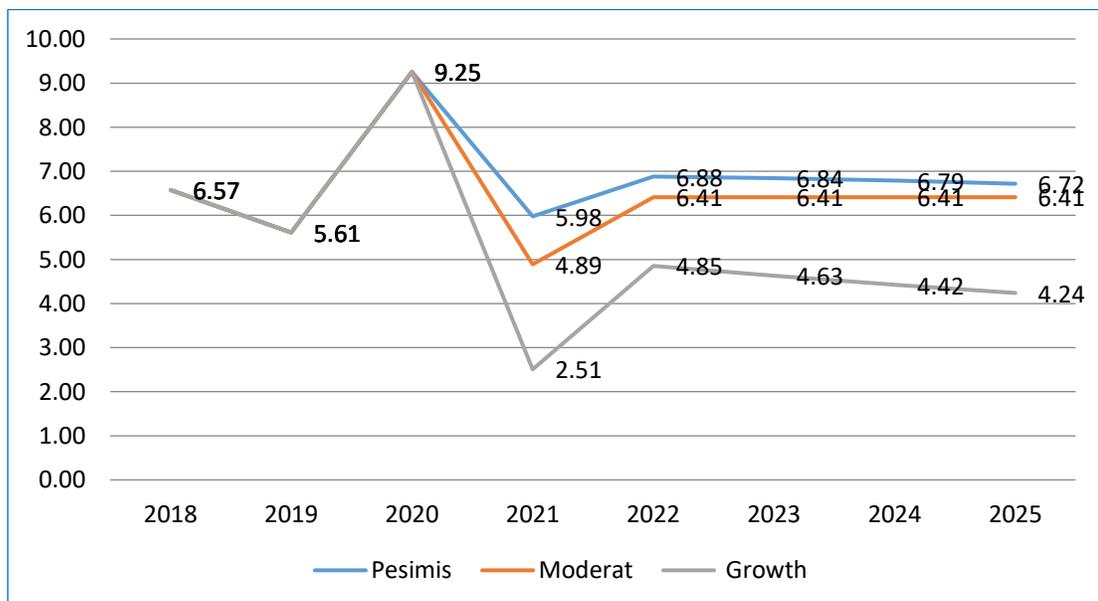
4.4.4 Kemiskinan

Garis kemiskinan di Kab. Tangerang diproyeksikan meningkat berdasarkan 3 skenario, dengan besar error yang sama. Semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok baik makanan maupun non-makanan diduga dapat menyebabkan garis kemiskinan di Kab. Tangerang meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah terutama dalam menciptakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi.

Tabel 8. Proyeksi Garis Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Pesimis	Moderat	Growth
2017	423,486	423,486	423,486
2018	451,325	451,325	451,325
2019	476,636	476,636	476,636
2020	520,741	520,741	520,741
2021*	551,882	546,188	533,806
2022*	589,844	581,201	559,719
2023*	630,217	618,459	585,631
2024*	672,999	658,104	611,544
2025*	718,192	700,292	637,456
MAPE	1	1	1

Berdasarkan hasil proyeksi, Laju Garis Kemiskinan di Kab. Tangerang tahun 2020 meningkat tinggi, namun hal ini dapat ditekan di tahun 2021 karena pemerintah berupaya mengatasi masalah dengan berbagai skema adaptasi pandemi Covid-19.



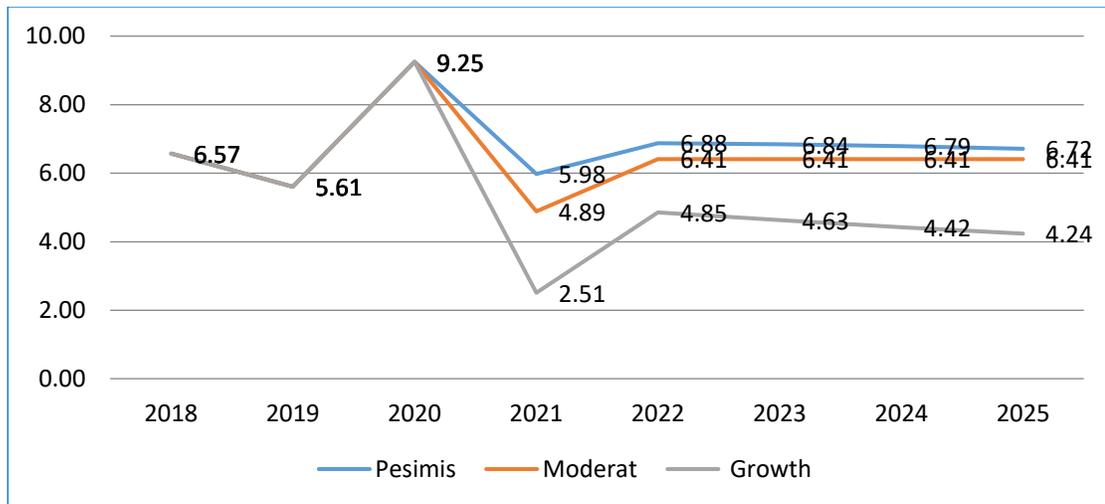
Gambar 36. Proyeksi Laju Garis Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Indeks kedalaman kemiskinan di Kab. Tangerang diproyeksikan menurun mengikuti skenario moderat dan growth, meskipun berdasarkan skenario pesimis mengalami peningkatan. Skenario pesimis memiliki *error* terkecil, namun skenario ini dapat diatasi dengan upaya pemerintah memperbaiki kemampuan daya beli masyarakat, melalui bantuan sosial dalam pemulihan pandemi Covid-19.

**Tabel 9. Proyeksi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025**

Indeks Kedalaman Kemiskinan	Pesimis	Moderat	Growth
2017	0.68	0.68	0.68
2018	0.82	0.82	0.82
2019	0.69	0.69	0.69
2020	0.95	0.95	0.95
2021*	1.06	0.69	0.67
2022*	1.23	0.67	0.64
2023*	1.42	0.65	0.61
2024*	1.65	0.63	0.57
2025*	1.91	0.61	0.54
MAPE	9.77	14.50	15.49

Berdasarkan hasil proyeksi, laju Indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan, meskipun sudah dapat ditekan di tahun 2021. Hal ini diduga karena pemerintah berupaya memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat dan melakukan stabilisasi harga.



Gambar 37. Proyeksi Laju Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

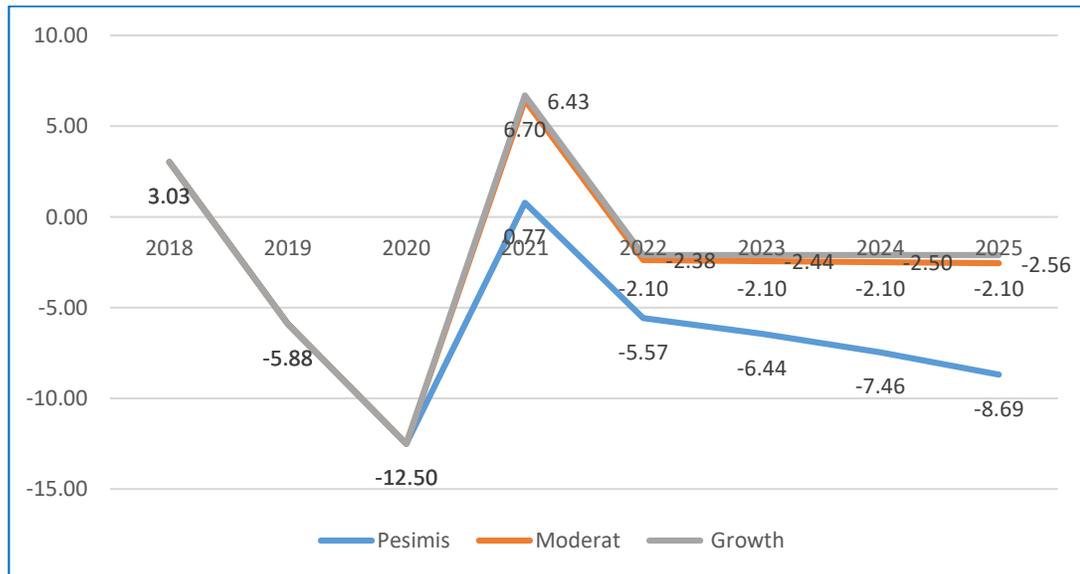
Gini Rasio di Kab. Tangerang diproyeksikan menurun berdasarkan 3 skenario proyeksi. Skenario pesimis memiliki *error* terkecil, artinya gini rasio dapat mendekati 0 dengan upaya pemerintah memperbaiki kemampuan daya beli masyarakat, melalui bantuan sosial dalam pemulihan pandemi Covid-19.

Tabel 10. Proyeksi Gini Rasio di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

Gini Rasio	Pesimis	Moderat	Growth
2017	0.33	0.33	0.33
2018	0.34	0.34	0.34
2019	0.32	0.32	0.32
2020	0.28	0.28	0.28
2021*	0.28	0.30	0.30
2022*	0.27	0.29	0.29
2023*	0.25	0.28	0.29
2024*	0.23	0.28	0.28
2025*	0.21	0.27	0.27
MAPE	5.41	5.74	5.68

Berdasarkan hasil proyeksi, laju gini rasio mengalami penurunan di tahun 2022 hingga 2025, meskipun tahun 2021 masih mengalami peningkatan.

Hal ini diduga dapat terjadi karena adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat akibat pandemi



Gambar 38. Proyeksi Gini Rasio di Kabupaten Tangerang

4.4.5 Tingkat Inflasi

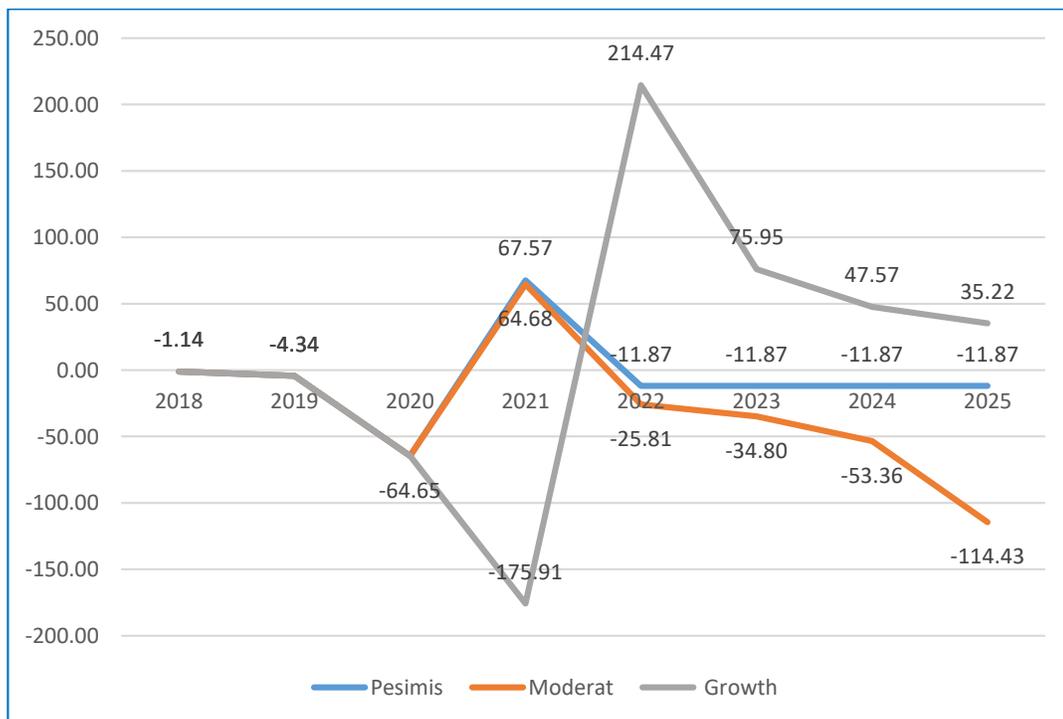
Tingkat inflasi menunjukkan terjadinya kenaikan inflasi di tahun 2013 dan 2014, namun tingkat inflasi tahun 2020 menurun ketika terjadi pandemi Covid-19. Tingkat inflasi di Kab. Tangerang diproyeksikan menurun mengikuti 3 skenario proyeksi. Skenario pesimis memiliki *error* terkecil.

Tabel 11. Proyeksi Tingkat Inflasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

Inflasi (%)	Pesimis	Moderat	Growth
2017	3.5	3.5	3.5
2018	3.46	3.46	3.46
2019	3.31	3.31	3.31
2020	1.17	1.17	1.17
2021*	1.96	1.93	-0.89
2022*	1.73	1.43	-2.79

Inflasi (%)	Pesimis	Moderat	Growth
2023*	1.52	0.93	-4.91
2024*	1.34	0.43	-7.25
2025*	1.18	-0.06	-9.81
MAPE	35.99	38.17	36.29

Berdasarkan hasil proyeksi, tahun 2021 inflasi Kab. Tangerang meningkat jika mengikuti skenario moderat dan pesimis, artinya pengendalian harga-harga terutama yang dapat memacu kenaikan inflasi harus diperhatikan pemerintah. Pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan menjaga kondisi keseimbangan antara supply dan demand dapat terjamin, dan pemerintah cepat tanggap dalam mengendalikan harga terutama harga-harga kebutuhan pokok.



Gambar 39. Proyeksi Tingkat Inflasi di Kabupaten Tangerang

BAB V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Simpulan

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial masyarakat yaitu, sebagian besar (66%) merasa kebutuhan pendidikan cukup dapat terpenuhi selama pandemi, hanya 62,24% masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS) selama pandemi, terdapat sebanyak 2,04% peningkatan jumlah masyarakat yang tidak bekerja akibat adanya pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang meningkat 24,7% ketika awal pandemi.
2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat yaitu, sebesar 63% pendapatan masyarakat turun akibat pandemi, sebesar 45% pengeluaran masyarakat tetap selama pandemi, masyarakat sebagian besar (51%) merasa bahwa kebutuhan pangan cukup terpenuhi selama pandemi.
3. Capaian kinerja ekonomi makro Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 atau ketika awal terjadi pandemi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi -3,11% akibat pandemi Covid-19 berdasarkan PDRB atas harga berlaku, laju pertumbuhan ekonomi -3,7 persen akibat pandemi Covid-19 berdasarkan PDRB atas harga konstan, laju IPM -0,01% ketika pandemi, laju peningkatan TPT Kab. Tangerang akibat Covid sebesar 46.58%, laju garis kemiskinan meningkat 9,25%, laju inflasi menurun ketika pandemi hingga berada di tingkat inflasi 1,17.
4. Efektivitas bantuan selama pandemi dilihat dari persepsi masyarakat, yaitu sebagian besar masyarakat (sebanyak 62%) mendapatkan bantuan selama pandemi, terdapat 30% masyarakat yang merasa bantuan yang telah diterima belum tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi, sebagian besar masyarakat (sebanyak 74%) merasa bantaun yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di masa pandemi.

5. Proyeksi capaian ekonomi makro Kabupaten Tangerang setelah pandemi, yaitu PDRB harga berlaku Kab. Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2025, PDRB harga berlaku Kab. Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2025, IPM Kab. Tangerang diproyeksikan mengalami peningkatan hingga tahun 2025, Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Tangerang diproyeksikan akan mengalami penurunan berdasarkan skenario moderat dan growth namun dapat mengalami peningkatan yang cukup besar jika mengikuti skenario pesimis, Gini Rasio di Kab. Tangerang diproyeksikan menurun, Tingkat inflasi di Kab. Tangerang diproyeksikan menurun.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Dalam menghadapi PPKM Level 3-4, pemerintah daerah dapat mempersiapkan bantuan sosial berupa bantuan tunai langsung, agar dapat menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat dan menjadi multiplier effect bagi aktivitas ekonomi
2. Dalam menghadapi PPKM Level 1-2, pemerintah tidak perlu melakukan hambatan terhadap kegiatan ekonomi (baik aktivitas ekonomi di tingkat pasar hingga ritel maupun aktivitas ekonomi berbagai sektoral), namun pengawasan terhadap pelaksanaan prokes diperketat, juga terus melakukan edukasi terkait prokes dan meningkatkan akses vaksin ke seluruh lapisan masyarakat.
3. Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi pengusaha kecil agar dapat tetap menjalankan usaha dan menstimulasi perekonomian kecil di masyarakat.
4. Menajlin kerjasama antara pemerintah dengan produsen lokal dalam penyediaan bantuan misalnya bantuan sembako berasal dari petani setempat atau pedagang setempat, sehingga bantuan yang diberikan tidak

dalam bentuk uang yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh masyarakat namun tetap dapat meningkatkan perekonomian lokal.

5. Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan target dan sasaran bantuan sosial dalam penyaluran bantuan yang diberikan selama pandemi, sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Tangerang. 2018. Kabupaten Tangerang dalam Angka tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
- BPS Kabupaten Tangerang. 2019. Kabupaten Tangerang dalam Angka tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
- BPS Kabupaten Tangerang. 2020. Kabupaten Tangerang dalam Angka tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
- BPS Kabupaten Tangerang. 2021. Kabupaten Tangerang dalam Angka tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
- UNICEF, UNDP, Prospera dan SMERU. 2021. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Covid-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Strategis untuk Indonesia. Jakarta.